

**PERAN KEPALA DESA DALAM MEREALISASIKAN PROGRAM
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI DI
DESA LAUT DENDANG KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh

Siti Kholijah

Nim 13.14.4.014

Program Studi: Pengembangan Masyarakat Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

**PERAN KEPALA DESA DALAM MEREALISASIKAN PROGRAM
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI DI
DESA LAUT DENDANG KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh

Siti Kholijah

Nim 13144014

Program Studi: Pengembangan Masyarakat Islam

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Abdullah, M. Si
Nip. 19621231 198903 1 047

Maulana Andi Surya, Ic, MA
NIP. 19750325 200801 1 011

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

ABSTRAK

Nama : Siti Kholijah
Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi
Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam Merealisasika Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui program yang dilakukan pemerintahan desa, realisasi program dan hambatan serta keberhasilan apa saja yang dialami pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat melalui program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri.

Program yang dilakukan pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat melalui program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri, dengan mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah desa melakukan berbagai rangkaian program dan kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat dengan program kerja: UP2K, koperasi wanita siaga, PPMK, dan BUMDesa. Kegiatan seperti: pembinaan PKBN, penyuluhan kadarkum, penyuluhan PA2K, gotong royong, kegiatan hari besar keagamaan, dan kegiatan lainnya telah dan sedang di lakukan di desa Laut Dendang.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan subjek penelitian adalah kepala desa Laut Dendang. Objek penelitian ini adalah masyarakat di desa Laut Dendang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap yaitu: reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan triangulasi.

Temuan penelitian ini sebagai berikut: (1) program kerja pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat Laut Dendang. (2) dalam memberdayakan masyarakat melalui program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri telah mampu memberikan pengaruh positif terhadap masyarakat sehingga dapat meningkatkan ekonomi keluarga.



KATA PENGANTAR

Puji syukur *alhamdulillah* kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Peran Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*”. Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, sebagai tugas akhir semester dalam mencapai gelar sarjana di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Rasulullah yang mana beliau telah memperjuangkan agama islam ini sehingga penulis bisa merasakan betapa manisnya iman itu.

Penulis skripsi ini adalah tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos), Jurusan PMI Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN SU untuk mencapai gelar sarjana. Segala upaya untuk menjadikan proposal ini mendekati sempurna telah peneliti lakukan, namun keterbatasan yang dimiliki peneliti maka akan dijumpai kekurangan baik dalam segi penulisan maupun segi ilmiah. Adapun terselesaikannya skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa ada dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Terimakasih kepada Bapak Prof. Saidurrahman, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Bapak Wakil Dekan I,II Dan III

2. Terimakasih kepada Bapak Dr. Soiman, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Negeri
3. Dengan kerendahan hati dan rasa terimakasih saya kepada Bapak Prof. Dr. H. Abdullah, M. Si dan Bapak Maulana Andi Surya, MA, yang telah membimbing dan membantu penulis yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing, mengkritis dan mengarahkan pembuatan skripsi ini.
4. Terimakasih kepada Bapak H. Muaz Tanjung, MA selaku ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, sejour Bapak Salamuddin, MA, serta seluruh dosen PMI.
5. Kepada pemerintah desa dan staf-stafnya beserta masyarakat yang mengikuti program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri atas bantuan dan bimbingannya sampai penyelesaian skripsi saya ini.
6. Teristimewa dan tercinta kepada ibunda dan alm ayahanda saya yang tidak pernah putus asa memberikan bantuan moral dan materi, pengorbanan serta dukungan yang sangat besar terhadap saya.
7. Terimakasih kepada kakak tersayang Chairani Husna, abang Chairun Sholeh, Choiri Amin serta adik Khaidah Hasanah yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih buat teman teman seperjuangan di PMI (Sri Rahmadani, Holida, Halimah, Yayuk, Hajar, Sifa, Fitri, Irma, Eko, Dian, Imam,

Perdana, afieq Serta adik-adik dan kawan seperjuangan di sekitaran jurusan PMI dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi) yang berjuang bersama sama dalam menuntut ilmu dan senantiasa ceria dan tak henti menyemangati penulis (Ilham Affandi, Riza Khairuna Sari, Sri Rezeki, Maulana, Alfi, Muthmainnah, Nur Azizah, Ainun Mardiah, dan Doktor Hasibuan)

9. Terimakasih kepada kakak senior tersayang Atika Asna, Erma Sari, Ratih Dewi serta boru Ivan dan M. Wahyu telah memotivasi penulis.
10. Terimakasih kepada adik-adik paduan suara Fakultas Dakwah dan Komunikasi (Dimas, Diki, Bayu, Jamal, Fauzi, Kiki, Nola, Nia, dan Lili) serta adik-adik yang selalu menyemangati penulis (Dimas Aditya, fauziah, putri, ummu, wita, dan balqis)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Istilah.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	11
B. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	18
C. Strategi Pemberdayaan Masyarakat	21
D. Peran Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat	26
E. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.	29
1. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.....	33
2. Kelembagaan Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.	38
F. Kajian Terdahulu	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Informan Penelitian.....	42
D. Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Teknik Analisis Data.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Desa Laut Dendang48
- B. Program Kerja Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri53
- C. Realisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri...61
- D. Hambatan dan Dukungan Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri63

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan66
- B. Saran.....67

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR WAWANCARA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan Lembaga Keuangan Desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya.¹

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (*grass root*), yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan (*empowering*) adalah memampukan dan memandirikan masyarakat miskin. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pilar kebijakan penanggulangan

¹ Usman, Sunyoto. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*: (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2006). hlm 16.

kemiskinan terpenting. Kemiskinan merupakan salah satu problem sosial yang amat serius. Masalah ini juga yang tidak ada habisnya di bahas dan telah lama ada. Dari ukuran kehidupan modern saat ini mereka tidak memiliki fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern. Kondisi miskin di Indonesia telah berdampak semakin meningkat jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di masyarakat yang tentunya juga membutuhkan penanganan yang serius dan terpadu.

Upaya untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan. Dan harus juga di dasari dengan usaha yang maksimal dari masyarakat itu sendiri, agar kehidupan mampu mencapai kesejahteraan. Hal ini seperti yang termuat pada QS. AR-Ra'd ayat 11, yaitu:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ، مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا
مَرَدَّ لَهُ، وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya :Bagi (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.²

²Depertemen Agama, Al-Qur'anulkarim dan terjemahannya: (bogor:2007). hlm 250.

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut antara lain terbukti dalam undang undang No. 13 / 1998 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan masyarakat, Undang-Undang No. 22 / 1999 tentang pokok-pokok pemerintah juga diperkuat oleh keputusan menteri sosial dan menteri koordinator kesejahteraan masyarakat tentang pola dasar pembangunan bidang kesejahteraan.

Dengan lahirnya Undang-Undang pedesaan dan penyelenggaraan pemerintah desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Salah satu poin yang paling penting dalam pembahasan RUU Desa adalah terkait alokasi anggaran untuk desa, di dalam penjelasan pasal 72 ayat 2 Tentang keuangan desa dimana saat ini setiap desa akan mendapatkan bantuan sebesar 1 milyar pertahun yang harus dimanfaatkan oleh kepala desa dengan sebaik-baiknya dalam rangka peningkatan sumber daya manusia bagi masyarakat. Salah satu program yang ada di desa Laut Dendang yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.³

PNPM Mandiri Pedesaan sebagai program penanggulangan kemiskinan di pedesaan lebih mengutamakan pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya dengan mendudukan masyarakat sebagai pelaku utamanya melalui partisipasi aktif. Melalui partisipasi aktif ini dari masyarakat miskin sebagai

³Lainatus Sifah, *Islam & Pembangunan*, (Bandung: Cita pustaka Media,2008). hlm 121.

kelompok sasaran tidak hanya berkedudukan menjadi objek program, tetapi ikut serta menentukan program yang paling cocok bagi mereka. Mereka memutuskan menjalankan, dan mengevaluasi hasil dari pelaksanaan program.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, mengenai Program Pengentasan Kemiskinan Pedesaan (P2KP) di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan, yang merupakan salah satu program yang dibawah oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), program ini membawa perubahan yang positif baik dalam masalah lingkungan maupun perihal keberdayaan masyarakat.⁴

Oleh karena itu, ada beberapa alasan mengapa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan menarik untuk dibahas. Pertama, masalah kemiskinan adalah permasalahan yang dialami oleh masyarakat Indonesia termasuk masyarakat di desa laut dendang. Oleh karena itu, permasalahan kemiskinan adalah permasalahan yang selalu menarik untuk dikaji guna menemukan solusi penanggulangannya, khususnya di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan. Alasan kedua mengapa PNPM Mandiri Perdesaan dianggap sebagai solusi terbaru dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan setelah program-program pemerintah yang sebelumnya dianggap kurang atau tidak mampu menekan dengan maksimal angka kemiskinan, dalam hal ini termasuk program pengentasan kemiskinan di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan.

⁴Pendum PNPM Mandiri, 2007. Website resmi PNPM. hlm 14.

Disamping itu juga, sisi menarik dari PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan yaitu untuk mengetahui apakah program ini berjalan dengan maksimal seperti apa yang menjadi tujuan, prinsip, dan sasaran. Dengan adanya program pemberdayaan menuntut adanya tanggung jawab bersama dalam menjalankan PNPM. Tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan dalam keterlibatan peranan semua pihak khususnya di Desa Laut Dendang berupa memberikan dukungan, motivasi, serta pengarahan daya pikir dan lain lain.

Partisipasi masyarakat Desa Laut Dendang menjadi sangat penting mengingat rumitnya masalah kemiskinan yang ada. Penanggulangan kemiskinan tentu bukan monopoli pemerintah dengan berbagai departemen sektoralnya tapi penanggulangan tersebut merupakan permasalahan multidimensi yang menjadi tanggungjawab seluruh pihak-pihak terkait. Ada alasan mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting terutama dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan karena program ini sepenuhnya dijalankan oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Menggerakkan partisipasi masyarakat bukan hanya esensial untuk mendukung kegiatan pembangunan yang digerakkan oleh pemerintah, khususnya dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, tetapi juga agar masyarakat Desa Laut Dendang berperan lebih besar dalam kegiatan yang dilakukannya sendiri.⁵

⁵Jauhari, *Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia 2005), hlm 42.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul

"Peran Kepala Desa Dalam Merealisasikan Program (PNPM) Mandiri di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang"

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah sering diartikan sebagai pembatasan masalah atau formulasi data. Rumusan masalah mencerminkan masalah pokok penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan?
2. Bagaimana hambatan dan keberhasilan Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan?
3. Bagaimana prestasi ekonomi masyarakat sesudah mendapatkan bantuan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan?

C. Batasan Isilah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang melakukan penjelasan agar mudah di mengerti dan mempermudah penulis dalam penulisan proposal ini,ada beberapa istilah yang perlu di jelaskan sesuai dengan maksud penelitian, yaitu:

1. Kata peran berarti konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi pemberdayaan masyarakat.⁶
2. Kepala Desa merupakan pimpinan tertinggi dari pemerintahan desa. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat di perpanjang lagi untuk 3 kali masa jabatan berikutnya berturut-turut.⁷
3. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.⁸
4. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah program nasional dalam mewujudkan kerangka kebijakan sebagai dasar

⁶<http://kbbi. Web. Id/Peran. Com>. Diakses pada tanggal 10 januari 2018 pukul 11.00 wib.

⁷<http://kbbi. Web. Id/Kepala Desa. Com>. Diakses pada tanggal 10 januari 2018 pukul 11. 15 wib.

⁸<http://kbbi. Web. Id/Pemberdayaan Masyarakat. Com>. Diakses pada tanggal 10 januari 2018 pukul 11.22 wib.

dan acuan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan.⁹

D. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah tentu mempunyai tujuan tertentu. Tujuan penelitian adalah jawaban atas pertanyaan apa yang akan dicapai dalam penelitian itu menurut misi ilmiah.

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui program kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui realisasi program yang dilakukan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
3. Untuk mengetahui hambatan dan dukungan dalam memberdayakan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

⁹PNPM 2012, PNPM Mandiri Masyarakat Pedesaan, website Resmi PNPM. Diakses pada tanggal 11 januari 2018 pukul 13.15 wib.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai kontribusi bagi dunia pendidikan, khususnya dalam hal pengembangan masyarakat islam.
2. Sebagai bahan masukan bagi pelengkap referensi maupun bahan perbandingan bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian di bidang pemberdayaan masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih lanjut dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti dengan tujuan agar nantinya penulis lebih terarah dan mudah untuk dipahami, kemudian penulis membuat proposal ini dalam tiga bab. Dan setiap bab di bagi sub-sub nya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Merupakan Landasan Teoritis yang terdiri dari konsep pemberdayaan masyarakat dan pengertian pemberdayaan masyarakat

BAB III Berisikan tentang Metodologi Penelitian terkait dengan penulisan proposal ini yang meliputi bahasan: lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB VI Berisikan tentang Hasil Penelitian yang meliputi peran kepala desa, hambatan dan keberhasilan kepala desa serta hasil prestasi ekonomi masyarakat yang mengikuti program (PNPM).

BAB V yaitu penutup. Berisikan kesimpulan akhir dan saran-saran terkait dengan hasil penelitian skripsi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan secara umum diartikan pemberkuasaan yang dalam bahasa inggris adalah “empowerment” dan secara konseptual diartikan pemberdaya. Berdasarkan arti tersebut pemberdayaan dapat diartikan seseorang atau lembaga yang memiliki daya atau usaha yang dapat mendorong atau memberdayakan orang lain sehingga menerima dan mematuhi apa yang diinginkan oleh pemberdaya. Bahwa pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan individu, kelompok dan masyarakat luas yang memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya termasuk sumber daya yang terkait dengan aktivitas dan pekerjaannya.¹

Berdasarkan teori tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemberdayaan dalam kehidupan masyarakat berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya dan lingkungan. Bahwa pemberdayaan dalam sebuah pemerintahan merupakan proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi memenuhi kehidupannya dalam bentuk pengetahuan. Dari penjelasan tersebut terlihat jelas bahwa upaya dalam mewujudkan partisipasi masyarakat secara optimal dengan meningkatkan pengetahuan yang bermanfaat dalam kehidupannya.

¹Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005). hlm45.

Berkenaan dari konsep pemberdayaan masyarakat, Winarni mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), serta terciptanya kemandirian. Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*).

Dengan pemahaman seperti itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi terkadang mereka tidak menyadari. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian di kembangkan. Jika berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran atas potensi yang dimiliki serta berusaha untuk mengembangkannya.

Pemberdayaan adalah proses partisipasi yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan pembangunan dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang di rancang untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan cara memberikan kepercayaan dan wewenang sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab.²

Pemahaman ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh masyarakat guna untuk lebih terlibat dalam mengambil keputusan. Dengan demikian akan meningkatkan kemampuan rasa memiliki juga tanggung jawab agar

²Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2017). hlm 62.

kinerja meningkat. Berdasarkan pemahaman tersebut maka untuk membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan potensi akan kesadaran yang dimiliki serta berupaya mengembangkan yang dilandasi dengan proses kemandirian.³

Menurut Edi Suharto bahwa dalam pemberdayaan memiliki 3 aras pemberdayaan yaitu: Makro, Mezzo dan Mikro.

a. Pemberdayaan Aras Mikro

Pemberdayaan sistem ini disebut sebagai strategi sistem kecil yang memiliki cakupan keluarga dengan titik tekanannya individu, salah satunya melalui bimbingan dan konseling.

b. Pemberdayaan Aras Mezzo

Pemberdayaan dilakukan dengan kelompok sebagai media intervensinya yaitu pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar masyarakat memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapi.

c. Pemberdayaan Aras Makro

Pendekatan ini disebut sebagai strategi sistem besar dengan intervensi perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, dan pengorganisasian masyarakat. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan dalam program pembangunan sosial mempunyai implikasi agar setiap kegiatan yang diciptakan bermutu pada proses yang sifatnya partisipatif.

³Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005). hlm 53.

Islam memandang suatu pemberdayaan atas masyarakat madani sebagai suatu hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam akan memiliki pendekatan-pendekatan yang holistik dan strategis. Berkaitan dengan itu, Islam telah memiliki paradigma strategis dan holistik dalam memandang suatu pemberdayaan. Berdasarkan pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya baik yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatannya di dunia maupun kesejahteraan dan keselamatannya di akhirat.⁴

Menurut Agus Ahmad Syaf'i, pemberdayaan atau *empowerment* dapat diartikan sebagai penguatan, dan secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan. Berdasarkan dengan istilah di atas, dalam pengalaman Al-Qur'an tentang pemberdayaan atau pemberdayaan masyarakat pada intinya adalah membantu klien (pihak yang diberdayakan), untuk memperoleh daya guna pengambilan keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan tentang diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimilikinya antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya. Menurut Jim Iffe mengatakan bahwa pemberdayaan dalam penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan

⁴Nani Machendrawaty dan Agus Ahmad Safi'i, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: Gerbang Masyarakat Baru, 2005). hlm 70.

keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka sehingga mereka bisa menemukan masa depan mereka yang lebih baik. Sedangkan pemberdayaan.

Menurut Agus Efendi mencoba menawarkan tiga kompleks pemberdayaan yang mendesak. Pertama, pemberdayaan pada matra ruhaniah. Pemberdayaan ini diperlukan karena degradasi moral masyarakat Islam saat ini sangatlah memprihatinkan. Kepribadian umat Islam terutama generasi mudanya begitu mudah terikut oleh budaya negatif Barat yang merupakan antitesa dari nilai-nilai Islam dan tidak dapat memilahnya. Kedua, pemberdayaan intelektual. Saat ini dapat disaksikan betapa umat Islam yang ada di Indonesia sudah terlalu jauh tertinggal dalam kemajuan dan penguasaan IPTEK. Untuk itu diperlukan berbagai upaya pemberdayaan intelektual sebagai sebuah perjuangan besar dari pengembalian orientasi pada pengembangan intelektual. Ketiga, pemberdayaan ekonomi. Harus diakui bahwa kemiskinan dan ketertinggalan menjadi demikian identik dengan mayoritas umat Islam, khususnya di Indonesia. Untuk memecahkannya, tentunya ada dalam masyarakat sendiri, mulai dari sistem ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah, keberpihakan pemerintahan dalam mengambil kebijakan ekonomi dan kemauan serta kemampuan masyarakat sendiri. Karenanya, diperlukan sebuah strategi dan kebijakan untuk keluar dari himpitan ketertinggalan dan ketimpangan ekonomi tersebut.

Kemiskinan dalam pandangan Islam bukanlah sebuah azab maupun kutukan dari Tuhan, namun disebabkan pemahaman manusia yang salah terhadap distribusi pendapatan (rezeki) yang diberikan.

Al-Qur'an telah menyinggung dalam surat Az-Zukhruf: 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Az-Zukhruf: 32).⁵

Perbedaan taraf hidup manusia adalah sebuah rahmat sekaligus pengingat bagi kelompok manusia yang lebih berdaya untuk salingmembantu dengan kelompok yang kurang mampu. Pemahaman seperti inilah yang harus ditanamkan di kalangan umat Islam, sikap simpati dan empati terhadap sesama harus di pupuk sejak awal.

Ayat di atas menunjukkan bahwa kemiskinan lebih banyak diakibatkan oleh sikap dan perilaku umat yang salah dalam memahami ayat-ayat Allah SWT, khususnya pemahaman terhadap kepemilikan harta kekayaan. Dengan demikian, apa

⁵Depertemen Agama, Al-Qur'anulkarim dan terjemahannya, (bogor:2007). hlm 260.

yang kemudian disebut dalam teori sosiologi sebagai kemiskinan absolut sebenarnya tidak perlu terjadi apabila umat Islam memahami secara benar dan menyeluruh.

Kemiskinan dalam Islam lebih banyak dilihat dari kacamata non-ekonomi seperti kemalasan, lemahnya daya juang, dan minimnya semangat kemandirian. Karena itu, dalam konsepsi pemberdayaan, titik berat pemberdayaan bukan saja pada sektor ekonomi (peningkatan pendapatan, Konsep pemberdayaan yang dicontohkan Rasulullah SAW mengandung pokok-pokok pikiran sangat maju, yang dititik beratkan pada Menghapuskan penyebab kemiskinan bukan pada Penghapusan kemiskinan semata seperti halnya dengan memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya sementara.⁶

Demikian pula, di dalam mengatasi problematika tersebut, Rasulullah tidak hanya memberikan nasihat dan anjuran, tetapi beliau juga memberi tuntunan berusaha agar rakyat biasa mampu mengatasi permasalahannya sendiri dengan apa yang dimilikinya, sesuai dengan keahliannya. Rasulullah SAW memberi tuntunan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dan menanamkan etika bahwa bekerja adalah sebuah nilai yang terpuji.

⁶Matthoriq, dkk, *Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Masyarakat Bajulmati, Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang)*, Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol. 2, No. 3, hlm 427.

B. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat pada umumnya memiliki tujuan untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Melalui pemberdayaan tersebut pemerintah mengupayakan berbagai program pembangunan agar masyarakat memiliki keterampilan dalam memenuhi kebutuhannya. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dengan pengarahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.⁷

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu untuk memberdayakan keterampilan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan, untuk menjadi mandiri maka perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik-material.

Pemberdayaan masyarakat hendaklah mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang atau

⁷Soetomo, *Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009). hlm 416.

masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif merupakan sikap dan nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.⁸

Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, afektif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, karena dengan demikian dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan yang dilengkapi dengan kecakapan keterampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhannya tersebut.

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan memerlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan/daya dari waktu ke waktu, dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kemandirian mereka, apa yang diharapkan dari pemberdayaan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal.

⁸Soetomo, *Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009). hlm 417.

Masyarakat yang memiliki kapasitas seperti itu berarti telah mampu mengelola pembangunannya secara mandiri. Bahkan masyarakat mandiri bukan hanya mempunyai kemampuan untuk mengelola proses pembangunannya melainkan juga mampu memecahkan dan mengantisipasi berbagai masalah sosial yang muncul.

Dengan begitu masyarakat perlu di perkuat atau di berdayakan untuk tidak menimbulkan ketergantungan. Sebab apabila terjadi justru akan menjadi beban besar bagi negara. Disamping itu, apabila masyarakat kuat dalam hal kewenangan untuk ikut serta dalam mengambil keputusan dan pengelolaan pembangunan juga akan membawa dampak yang positif baik dari sisi masyarakat maupun negara.⁹

Berdasarkan pendapat tersebut maka dilihat dari sudut masyarakat, kewenangan dan kapasitas dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan akan lebih mendorong potensi masyarakat, lebih menjamin kesinambungan proses pembangunan oleh masyarakat sendiri. Dan dari sudut negara akan menyebabkan program-program pembangunan oleh negara menjadi efektif serta lebih relevan dan menyentuh kebutuhan nyata masyarakat karena telah mengakomodasi aspirasi dari bawah. Salah satu aktualisasi pemberdayaan masyarakat tercermin melalui partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan mulai dari proses mengambil keputusan, pelaksanaan dan sampai menikmati hasil.

Peningkatan partisipasi dan peran masyarakat berarti akan mengurangi peranan pemerintah menurut Loekman Soetrisno di butuhkan beberapa syarat yaitu:

⁹Soetomo, *Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009). hlm 418.

1. Perubahan persepsi dan anggapan bahwa rakyat sekedar sumber energi juga menjadi sumber informasi yang ikut menentukan dalam pengambilan keputusan.
2. Perubahan fungsi dan makna kekuasaan tidak hanya berarti hak untuk mengatur akan tetapi membantu rakyat dalam memecahkan masalah pembangunan yang tidak dapat di pecahkan sendiri.
3. Perubahan persepsi tentang sistem panutan yang seolah olah rakyat tidak memiliki aspirasi dan pendapat sendiri.
4. Berangkat dari pemahaman bahwa desa-desa di indonesia cukup beraneka ragam, sehingga tidak dapat menggunakan pendekatan uniformitas.
5. Kelompok miskin tidak lagi dipersepsikan sebagai kelompok yang tidak produktif, karena walaupun miskin materi tidak miks in pengalaman pembangunan, jiwa kewiraswastaan dan keterampilan teknis.

Dengan pemberdayaan multidimensi di samping di harapkan agar dapat menangani sumber masalah secara komperhensif juga agar dapat menjadi sinergi diantara masing-masing aspek.

C. Srategi Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus di capai, oleh sebab itu setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi demi keberhasilan untuk mencapai

tujuanyang diinginkan.¹⁰ Dalam pengertian sehari-hari strategi sering diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang di laksanakan demi tercapainya suatu tujuan atau penerimaan manfaat yang di kehendaki, oleh sebab itu pengertian strategi sering rancu dengan metode, tehnik atau taktik.

Berdasarkan hal tersebut, secara konseptual strategi sering diartikan dengan beragam pendekatan, seperti:

1. Strategi sebagai suatu rencana

Sebagai suatu rencana, strategi merupakan pedoman atau acuan yang dijadikan landasan pelaksanaan kegiatan, demi tercapainya tujuan-tujuan yang ditetapkan. Dalam hubungan ini, maka rumusan strategi senantiasa memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang di lakukan oleh para pesaingnya.

2. Strategi sebagai kegiatan

Sebagai suatu kegiatan, strategi merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh setiap individu, organisasi, atau perusahaan untuk memenangkan persaingan, demi tercapainya tujuan yang diharapkan.¹¹

3. Strategi sebagai suatu instrumen

¹⁰Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2017). hlm 167.

¹¹Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2017). hlm 168.

Sebagai suatu instrumen, strategi merupakan alat yang digunakan oleh semua unsur pimpinan organisasi/perusahaan, terutama manajemen puncak, sebagai pedoman sekaligus alat pengendali pelaksanaan kegiatan.

4. Strategi sebagai suatu sistem

Sebagai suatu sistem, strategi merupakan satu kesatuan rencana dan tindakan-tindakan yang komprehensif dan terpadu, yang diarahkan untuk menghadapi tantangan-tantangan guna mencapai tujuan yang ditetapkan.

5. Strategi sebagai pola pikir

Sebagai pola pikir, strategi merupakan suatu tindakan yang dilandasi oleh wawasan yang luas tentang keadaan internal maupun eksternal untuk jangka waktu yang tidak pendek, serta kemampuan pengambilan keputusan untuk memilih alternatif-alternatif terbaik yang dapat dilakukan dengan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada, yang dibarengi dengan upaya-upaya untuk menutupi kelemahan-kelemahan guna mengantisipasi atau meminimumkan ancaman-ancamannya.¹²

Dari pemahaman yang beragam pengertian tentang strategi penulis dapat menyimpulkan bahwa strategi merupakan suatu proses sekaligus produk yang penting yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memenangkan persaingan demi tercapainya tujuan.

Strategi pemberdayaan masyarakat, pada dasarnya mempunyai tiga arah yaitu:

¹²Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2017). hlm 169.

1. Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat.
3. Modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi (termasuk dalam kesehatan), budaya dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat di laksanakan dengan strategi berikut:¹³

1. Menyusun instrumen pengumpulan data. Dalam kegiatan ini informasi yang diperlukan dapat berupa hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, referensi yang ada, dari hasil temuan dan pengalaman lapangan.
2. Membangun pemahaman, komitmen untuk mendorong kemandirian individu, keluarga dan masyarakat,
3. Mempersiapkan sistem informasi, mengembangkan sistem analisis, intervensi, monitoring dan evaluasi pemberdayaan individu keluarga dan masyarakat.

Hutomo mengemukakan bahwa program pemberdayaan masyarakat sebaiknya dilaksanakan dengan pendekatan kelompok karena dengan kelompok akumulasi modal masyarakat miskin dapat tercapai, disamping masyarakat miskin

¹³Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2017). hlm 170.

juga dapat membangun kekuatan dalam mengontrol input maupun distribusi hasil produksi. Pengembangan kelembagaan dalam masyarakat miskin dapat mempermudah akses permodalan terhadap lembaga keuangan yang sudah ada, selain itu kelompok juga dapat membangun kelembagaan keuangan tersendiri dengan memanfaatkan bantuan modal dari program pemberdayaan yang digulirkan pemerintah. Aspek kelembagaan yang lain adalah dalam hal kemitraan antar skala usaha dan jenis usaha, pasar barang, dan pasar input produksi.¹⁴

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pada dasarnya memiliki tahapan-tahapan yang mempengaruhi terhadap keberhasilan program ,secara terperinci tahapan tersebut adalah:

1. Seleksi Lokasi/Wilayah Seleksi wilayah dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat. Penetapan kriteria penting agar tujuan lembaga dalam pemberdayaan masyarakat akan tercapai serta pemilihan lokasi dilakukan sebaik mungkin.
2. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan ini untuk menciptakan komunikasi serta dialog dengan masyarakat. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat membantu untuk meningkatkan pengertian masyarakat dan pihak terkait tentang program. Proses sosialisasi sangat menentukan ketertarikan masyarakat untuk berperan dan terlibat dalam program.

¹⁴Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2017). hlm 125.

3. Proses Pemberdayaan Masyarakat Maksud pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya (tujuan umum). Dalam proses tersebut masyarakat bersama-sama melakukan hal-hal berikut:¹⁵
 - a. Mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan, potensi serta peluang.
 - b. Menyusun rencana kegiatan kelompok berdasarkan hasil kajian .
 - c. Menerapkan rencana kegiatan kelompok.
 - d. Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus (monitoring dan evaluasi partisipatif) sebagai suatu proses penilaian, pengkajian dan pemantauan kegiatan pemberdayaan masyarakat, baik proses maupun hasil serta dampaknya agar dapat disusun proses perbaikan kalau diperlukan.
4. Pemandirian Masyarakat Berpegang pada prinsip pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka arah pendampingan kelompok adalah mempersiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya.

D. Peran Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan, dimiliki orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Menurut Biddle dan Thomas peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-prilaku yang

¹⁵Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2017). hlm 126.

diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Biddle dan Thomas juga memberikan peristilahan dalam teori peran dibagi menjadi empat golongan yaitu istilah-istilah yang menyangkut:¹⁶

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.
- c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku.
- d. Kaitan orang dengan perilaku.

Dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa peran lebih difokuskan terhadap perilaku dan interaksi seseorang di dalam kehidupan sosial dimana kepemilikan peran lebih didasarkan pada kedudukan seseorang dalam lingkungan kehidupan sosialnya dan perilaku yang ditunjukkan dalam proses interaksi terhadap orang lain.

Menurut Soerjono Soekanto peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan hak dan kewajiban dari suatu kedudukan seseorang. Peran berfungsi sebagai tugas yang seharusnya dilakukan dan merupakan hal-hal yang sepatutnya diperoleh dari kepemilikan tugasnya, dan kedua hal tersebut harus dilakukan secara seimbang agar bisa dikatakan telah melaksanakan perannya.

Keanekaragaman kepribadian itulah, justru yang menjadi salah satu tantangan yang paling berat untuk dihadapi oleh oleh setiap pimpinan dan kemampuan dalam

¹⁶Sigit Suwardianto, "Peranan Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Desa Sidoangung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman", jurnal pemberdayaan masyarakat volume 1 , (online), di akses pada tanggal 1 februari 2018 pukul 15.36. hlm 33.

menghadapi tantangan itu pulalah salah satu indikator terpenting, bukan saja dari efektifitas kepemimpinan seseorang akan tetapi juga mengenai ketangguhan organisasi yang dipimpinnya.

Dari penjelasan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran adalah suatu pola sikap, nilai dan tujuan yang diharapkan dari seseorang yang berdasarkan posisinya dimasyarakat. Sementara posisi tersebut merupakan identifikasi dari status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial dan merupakan perwujudan dan aktualisi diri. Peran juga diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan oleh lingkungan sosial berhubungan dengan fungsi individu dalam berbagai kelompok sosial. Pelaksaaan mengenai tugas dan fungsi seorang Kepala Desa dalam pemerintahan merupakan salah satu bentuk kegiatan aparat pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan peran Kepala Desa demikian besar, yang pertama, Kepala Desa mempunyai wewenang yang betul-betul nyata. Kedua, Kepala Desa mempunyai posisi yang sangat kuat sebagai wakil pemerintah di desa. Hal ini karena bupatilah yang membuat keputusan akhir dan memberi surat pengangkatannya. meskipun kepala desa di pilih langsung oleh rakyat.¹⁷

¹⁷Sigit Suwardianto, “Peranan Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Desa Sidoangung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman”, jurnal pemberdayaan masyarakat volume 1 , (online), di akses pada tanggal 1 februari 2018 pukul 15.36. hlm 35.

Pemberdayaan yang di maksud di sini adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup melalui penguatan kapasitas masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Peran kepala desa dalam memberdayakan masyarakat desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dapat dioperasionalkan sebagai berikut:

- a. Membina kehidupan masyarakat desa.
- b. Membina perekonomian desa.
- c. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

E. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

Dalam upaya mengatasi kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, diperlukan suatu usaha penanggulangan dengan menggunakan pendekatan yang multi disiplin dan berdimensi pemberdayaan. Oleh karena itu mulai tahun 2007 pemerintah Indonesia mengeluarkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Program ini melibatkan masyarakat dalam pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Pada program ini, masyarakat diharapkan menjadi mandiri dan berperan sebagai subyek dalam upaya penanggulangan kemiskinan.¹⁸

¹⁸[https://id.wikipedia.org/wiki/PNPM Mandiri Pedesaan](https://id.wikipedia.org/wiki/PNPM_Mandiri_Pedesaan) diakses pada tanggal 17 januari 2018 pukul 15.43 wib.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan (PNPM) Mandiri ini terdiri dari tujuan umum dan khusus yaitu:

1. Tujuan Umum

Tujuan umum PNPM Mandiri adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

2. Tujuan Khusus.

- a. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.¹⁹
- b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel.

¹⁹Cipta Karya, Dirjen. *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan*, (Jakarta:Departemen Pekerjaan Umum,2009). hlm 56.

- c. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*propoor*).
- d. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
- e. Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
- f. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
- g. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

Proses pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan secara instan, namun melalui serangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan, dilaksanakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri. Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dalam PNPM Mandiri dilakukan melalui komponen program (pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri, 2008:31) sebagai berikut: ²⁰

²⁰Cipta Karya, Dirjen. *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan*, (Jakarta:Departemen Pekerjaan Umum, 2009). hlm 57.

1. Pengembangan masyarakat Komponen.

Pengembangan Masyarakat Komponen ini mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai. Untuk mendukung kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan, dan operasional pendampingan masyarakat dan fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya.

2. Bantuan langsung masyarakat Komponen.

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) komponen ini adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada sekelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, terutama masyarakat miskin.

3. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal Komponen.

peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini

antara lain seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif, dan sebagainya.

4. Bantuan pengelolaan dan pengembangan program Komponen.

Bantuan pengelolaan dan pengembangan program Komponen ini meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi, dan pengembangan program.

1. Pemberdayaan masyarakat melalui program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri

Pemberdayaan Masyarakat melalui PNPM Mandiri merupakan kegiatan lanjutan dari Program Penanggulangan Kemiskinan (P2K) yang dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini termasuk salah satu program strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (*social capital*) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.²¹

²¹[https://id.wikipedia.org/wiki. PNPM Mandiri Pedesaan](https://id.wikipedia.org/wiki/PNPM_Mandiri_Pedesaan) diakses pada tanggal 17 januari 2018 pukul 15.43 wib.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan, yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal.

Visi kegiatan (PNPM) Mandiri adalah terciptanya masyarakat yang berdaya yang mampu menjalin sinergi dengan pemerintah daerah serta kelompok peduli setempat dalam rangka menanggulangi kemiskinan dengan efektif, secara mandiri dan berkelanjutan. Misi kegiatan (PNPM) Mandiri adalah memberdayakan masyarakat, terutama masyarakat miskin, untuk menjalin kerjasama sinergis dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli lokal dalam upaya penanggulangan kemiskinan, melalui pengembangan kapasitas, penyediaan sumber daya, dan melembagakan budaya kemitraan antar pelaku pembangunan.

Dari visi dan misi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan kapasitas merupakan salah satu aspek dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yaitu menanggulangi kemiskinan.

Tujuan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah:

- a. Mewujudkan masyarakat berdaya dan mandiri, yang mampu mengatasi berbagai persoalan kemiskinan di wilayahnya, sejalan dengan kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

- b. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam menerapkan model pembangunan partisipatif yang berbasis kemitraan dengan masyarakat dan kelompok peduli setempat.
- c. Mewujudkan harmonisasi dan sinergi berbagai program pemberdayaan masyarakat untuk optimalisasi penanggulangan kemiskinan.
- d. Meningkatkan pencapaian manfaat bagi masyarakat miskin Sasaran.

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah:

- a. Terbangunnya lembaga kepemimpinan masyarakat (BKM) yang aspiratif, representatif, dan akuntabel untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi serta kemandirian masyarakat.
- b. Tersedianya perencanaan jangka menengah sebagai wadah untuk mewujudkan sinergi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam rangka pengembangan lingkungan permukiman yang sehat, serasi, berjati diri dan berkelanjutan.²²

Prinsip dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri adalah :

- a. Transparansi.

²²[https://id.wikipedia.org/wiki/PNPM Mandiri Pedesaan](https://id.wikipedia.org/wiki/PNPM_Mandiri_Pedesaan) diakses pada tanggal 17 januari 2018 pukul 15.43 wib.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri menekankan transparansi dan penyebaran informasi di semua tahapan program. Pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan harus dilaksanakan secara terbuka dan disebarluaskan kepada seluruh masyarakat.

b. Keberpihakan kepada orang miskin.

Setiap kegiatan ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dengan mempertimbangkan dan melibatkan masyarakat kurang mampu dalam setiap tahap kegiatan.

c. Partisipasi/melibatkan masyarakat.

Partisipasi masyarakat ditekankan, khususnya kepada masyarakat miskin. Partisipasi harus menyeluruh, pengambilan keputusan atas kesepakatan seluruh masyarakat.

d. Kompetisi untuk dana.

Harus ada kompetisi sehat antara masyarakat untuk mendapatkan dana.

e. Desentralisasi.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri memberikan wewenang kepada masyarakat untuk membuat keputusan mengenai jenis kegiatan yang mereka butuhkan, serta mengelolanya secara mandiri dan partisipatif. Pendekatan yang digunakan dalam pencapaian tujuan dari pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah sebagai berikut:

- a. Melembagakan pola pembangunan partisipatif yang berorientasi masyarakat miskin dan berkeadilan, melalui pembangunan lembaga kepemimpinan masyarakat (BKM) yang representatif, akuntabel, dan mampu menyuarakan kepentingan masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan dan perencanaan partisipatif dalam menyusun tujuan jangka menengah program penanggulangan kemiskinan.²³
- b. Menyediakan stimulan bantuan langsung masyarakat secara transparan untuk mendanai kegiatan penanggulangan kemiskinan yang mudah dilakukan oleh masyarakat dan membuka kesempatan kerja, melalui pembangunan sarana/prasarana lingkungan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi lokal dengan syarat tertentu, memperkuat keberlanjutan program dengan menumbuhkan rasa memiliki di kalangan masyarakat melalui proses penyadaran kritis, partisipatif, pengelolaan hasil-hasilnya, dan lainnya.
- c. Meningkatkan kemampuan perangkat pemerintah dalam perencanaan, penganggaran, dan pengembangan paska program.
- d. Meningkatkan efektifitas perencanaan dan penganggaran yang lebih berorientasi pada masyarakat miskin dan berkeadilan.

²³Hutomo, M.Y, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi*, (Artikel Majalah Perencanaan Bappenas Naskha 2000 No. 200), (online), diakses 26 oktober 2017.

2. Kelembagaan dalam program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri

Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dilaksanakan melalui suatu lembaga kepemimpinan masyarakat yang dipercaya, disebut lembaga keswadayaan masyarakat (secara generik disebut Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), yang dibentuk melalui kesadaran kritis masyarakat untuk menggali kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan sebagai pondasi modal sosial (*social capital*) kehidupan masyarakat. Badan keswadayaan masyarakat (BKM) ini diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka, sekaligus menjadi motor bagi upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan, mulai dari proses penentuan kebutuhan, pengambilan keputusan, proses penyusunan program, pelaksanaan program hingga pemanfaatan dan pemeliharaan.²⁴

Badan keswadayaan masyarakat (BKM) bersama masyarakat bertugas menyusun perencanaan jangka menengah program penanggulangan kemiskinan secara partisipatif, sebagai prakarsa masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan di wilayahnya secara mandiri. Atas fasilitas pemerintah dan prakarsa masyarakat, (BKM) mulai menjalin kemitraan dengan berbagai instansi pemerintah dan kelompok peduli setempat.

²⁴Hadiyanti, Puji, 2006. *Kemiskinan dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, *Jurnal Pengembangan Islam Volume 2, No 1*, (online), komunitas. diakses pada tanggal 1 Desember 2017 pukul 15.25.

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) memiliki unit pelaksana di bawahnya, yaitu Unit Pelaksana Sosial (UPS), Unit Pelaksana Lingkungan (UPL) dan Unit Pelaksana Keuangan (UPK). Unit-unit pelaksana ini berada di bawah BKM dan bertanggung jawab kepada BKM. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) juga bertanggungjawab untuk menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang kondusif untuk pengembangan keswadayaanmasyarakat dalam penanggulangan kemiskinan khususnya dan pembangunan masyarakat kelurahan pada umumnya.

Lembaga-lembaga partisipatif lainnya yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), yang dibentuk di tingkat komunitas atau masyarakat untuk melakukan agenda kegiatan secara langsung. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ini dapat dibentuk oleh siapa saja atau kelompok masyarakat apabila diperlukan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu yang dianggap perlu bagi pembangunan dalam komunitas tersebut.

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ini diorganisasikan oleh tim relawan dan dibantu oleh tim fasilitator terdiri dari warga kelurahan yang memiliki ikatan kebersamaan (*common bond*) dan berjuang untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ini bukan hanya sekedar pemanfaat pasif melainkan sekaligus sebagai pelaksana kegiatan terkait dengan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan untuk didanai oleh BKM melalui berbagai dana yang mampu digalang.

F. KAJIAN TERDAHULU

Berikut ini terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang dk jadikan referensi dan perbandingan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini:

1. Agus Hermawan dengan judul “ implementasi program pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNP-MP) dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa”. Adapun kesimpulan dari skripsi beliau adalah implementasi penerapan program nasional pemberdayaan masyarakat pedesaan (PNP-MP) yang meliputi alokasi dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Anggaran Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disalurkan ke desa dari kecamatan dan kegiatannya yaitu pengerasan jalan dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Selanjutnya partisipasi masyarakat yang mencakup faktor yang mempengaruhi pelaksanaan partisipasi masyarakat yaitu faktor usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan lama tinggal dan bentuk partisipasinya seperti uang atau harta benda, tenaga atau keterampilan, buah pikiran dan partisipasi sosial.
2. Endang Murti dan Harianto, dengan judul “ Pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM-M) dalam menunjang kesejahteraan masyarakat”. Adapun kesimpulan dari pembahasan skripsi beliau yaitu Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat diperdesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi, Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2-DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Kemudian tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerahsekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai epartemen/sektor dan pemerintah daerah.

Hasil analisis di lapangan bahwa program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri sangat membantu dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Dengan kelangsungan program ini maka partisipasi masyarakat sangat di butuhkan karena program ini sepenuhnya dijalankan oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di laksanakan di salah satu desa yang bertempat di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Alasan penelitian memilih lokasi ini adalah karena program ini berjalan dengan baik dan mencapai keberhasilan yang baik pula serta memberikan kontribusi positif yang sangat kuat yang di berikan kepada masyarakat sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme atau pradigma interpretif dan konstruktif, yang memandang realita sosial sebagai suatu yang holistic/utuh, penuh makna dan hubungan gejala bersifat interaktif.

C. Informan Penelitian

Adapun informan penelitian berjumlah 5 orang di mana 2 orang terdiri dari pemerintahan desa, 1 orang terdiri dari program PNPM dan 2 orang terdiri dari masyarakat yang ikut dalam program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri yang bermukim di lokasi Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Alasan peneliti menjadikan mereka sebagai informan penelitian adalah mereka selaku orang yang bekerja didalam pemerintahan desa dan mereka mampu

memberikan informasi serta mereka juga yang bertanggung jawab atas terlaksananya program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri ini, peneliti juga memilih 5 orang informan dengan alasan mereka yang menjalankan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri tersebut dan mereka termasuk masyarakat yang bertempat tinggal dilokasi penelitian di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. berikut adalah tabel identitas informan yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini.

Tabel 1. Tokoh Pemerintah Desa

No	Nama	Pendidikan	Usia
1	Bapak Suwardi	SMA	44 Tahun
2	Bapak Nono Ismanto	D3	51 Tahun

Tabel 2. Tokoh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

No	Nama	Pendidikan	Usia
1	Ibu Fitri	SMA	40 Tahun

Tabel 3. Tokoh masyarakat yang mengikuti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

No	Nama	Usaha	Usia
----	------	-------	------

1	Bapak Samsudin Lubis	Mie sop iga-iga	49 Tahun
2	Bapak Supati	Ayam penyet	43 Tahun

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data utama yang berasal dari beberapa informan yang telah ditetapkan.

2. Sumber Data Skunder

Data skunder diperoleh data pendukung yang berkaitan dengan penelitian berupa buku buku, dokumentasi, dan internet yang relavan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka penulis mempergunakan beberapa alat pengumpulan data. Adapun alat pengumpulan data tersebut adalah:¹

A. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan kepada terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Peneliti mendapatkan data dengan cara bertanya jawab dan bertatap muka antara penelitian

¹ H.M Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif , (jakarta:PT. Raja Grafindo Prsada, 2007). hlm 110 .

dengan pihak kepala desa, koordinator PNPM, anggota-anggota PNPM serta masyarakat yang mengikuti program desa.

B. Observasi atau Pengamatan

Observasi atau Pengamatan merupakan dasar semua ilmu pengetahuan. Observasi dapat dilakukan secara langsung dengan mata tanpa alat bantu yang sederhana sampai dengan yang canggih. Observasi yang penulis maksudkan disini adalah untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

C. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan dengan menginpestrasikan dokumen-dokumen yang relevan dan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan dan pengelolaan data agar dapat ditafsirkan lebih lanjut. Untuk itu data yang didapat dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif model interaktif yang terdiri dari:

1. Reduksi Data

Merupakan proses penelitian, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data langsung terus menerus selama penelitian berlangsung.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang berkemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Menarik kesimpulan/verifikasi

Setelah data disajikan yang juga dalam rangkaian analisis data maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Proses verifikasi data dalam hal ini adalah tinjauan ulang terhadap catatan lapangan. Data yang telah diperoleh dari catatan-catatan lapangan, dari informasi dan informan yang telah ditemukan, diuji kembali dengan menanyakan kembali pertanyaan yang sama di akhir penelitian dan melakukan wawancara kepada kepala desa.

4. Triangulasi

Triangulasi adalah kombinasi beragam sumber data, tenaga penelitian, teori dan teknik metodologi dalam suatu penelitian atas gejala sosial. Triangulasi di perlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri.

Tipe-tipe trigulasi sebagai berikut:

1. Triangulasi data yaitu penggunaan beragam sumber data penelitian
2. Triangulasi penelitian yaitu menggunakan beberapa penelitian yang berbeda disiplin ilmunya dalam suatu penelitian
3. Triangulasi teknik metodologis yaitu penggunaan sejumlah teknik dalam suatu penelitian.

Pada tahap ini merupakan tahap untuk mencari dan menata secara sistematis hasil observasi, wawancara dan data pendukung lainnya untuk lebih memahami peneliti atas fenomena yang diteliti.²

²<http://nuzlimuhammad.blogspot.com/2012/08/teknik-triangulasi-dalam-penelitian.html>.
Di akses pada tanggal 20 februari 2018 pukul 22.00 wib.

Analisis data penelitian kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikannya serta memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistematiskannya, mencari dan menemukan pola-pola yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Laut Dendang

1. Sejarah Singkat Desa Laut Dendang

Cikal bakal Desa Laut Dendang diawali dengan terbentuknya desa induk seluas lebih dari 2 ha yang terletak di bagian timur desa dan perbatasan dengan sungai tembung dan diapit sekelilingnya oleh perkebunan *Vereningde Deli Matchapji* (VDM), pada desa induk tersebut telah diterbitkan dasar surat berupa Grant Sulthan Deli kepada 8 orang penduduk pribumi bertarikh 1927. Kampoeng Laut Dendang pada masa itu bergabung dengan kampoeng Indrakasih (sekarang kelurahan Indrakasih Kecamatan Medan Tembung) dalam hal urusan administrasi surat menyurat.¹

Kata “Laut Dendang” sendiri masih sulit dicari penamaannya. Namun, dari lagenda tanah melayu dalam kisah Sri Putih Cermin, Laut Dendang berasal dari kata Laut (rawa) tempat untuk berdendang (bernyanyi) karena merupakan persinggahan Sri Putih Cermin bersama tunggangannya seekor burung rangkok raksasa yang diiringi ribuan pengiringnya. Sehingga lamban laun rawa tersebut tertimbun kotoran burung rangkok tersebut sehingga menjadi darat. Keadaan sekitarnya yang berupa bandar. Seperti Bandar Setia, Bandar Selamat, Bandar Khalipah. Bandar Selamat

¹ Sumber: Data desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan

sering kali mendengar dendang dari tengah rawa (laut) kemudian mereka menamainya “Laut Dendang”.

Pada tahun 1990-an, Vereningde Deli Matchapi setelah dinasionalisasi menjadi Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) IX memberikan suguhan kepada masyarakat. Kemudian terjadi perluasan wilayah sampai ke belairejo (pasa XII) dan perbatasan dengan kebun pisang (sekarang Medan Estate) sehingga terbentuklah Desa Laut Dendang yang ada sekarang.

Beberapa kepala kampoeng/kepala desa yang pernah menjabat yaitu:

1. H.M. Sarimin HS 1952-1968
2. M. Ilyas 1968-1969
3. Selamat Reso Wiriyo 1969-1995
4. Sulasno Selamat 1995-2004
5. Sudarso 2004-2009
6. Suwardi 2010 sampai sekarang

2. Kondisi Geografis

Desa Laut Dendang terletak di dataran rendah dengan ketinggian 15 meter diatas permukaan laut dengan suhu rata-rata berkisar 24-32 C dengan curah hujan

rata-rata 1500-2000 MM/meter, mempunyai luas 170 ha. Merupakan kampung penduduk sejak tahun 1920.²

Desa Laut Dendang mempunyai batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sampali, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bandar Setia, sebelah Selatan berbatasan dengan Medan Estate, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sampali.

3. Penduduk

Penduduk Desa Laut Dendang 14,795 jiwa

Rincian : Laki-Laki : 7503 Jiwa

Perempuan : 7292 Jiwa

Jumlah : 14,795 Jiwa

Jumlah Kepala Keluarga tergolong miskin: 379 Kepala Keluarga kepadatan pendudukan rata-rata 148 jiwa/Km.³

4. Visi dan Misi Desa Laut Dendang

a. Visi

“LAUT DENDANG MANTAP, MANDIRI, AMAN, NYAMAN, TERTIB, ASRI, DAN PEDULI”. Adapun penjelasan terhadap visi tersebut adalah:

² Sumber: Data desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan

³ Sumber: data desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan

Mandiri: mempunyai kemampuan untuk mengoptimalkan kemanfaatan potensi yang dimiliki sehingga dapat melaksanakan segala aspek kegiatan sosial dan pembangunan tanpa tergantung dari pihak lain.

Aman: mampu mempertahankan situasi yang kondusif, dan tidak terjadi konflik baik secara vertikal maupun orizontal dengan motto: Mari Kita Menjalinkan Kebersamaan dan Silaturahmi.

Nyaman: menciptakan suasana yang tenang dan damai, dengan penegakan supremasi hukum yang baik guna melindungi warga masyarakat dengan rasa keadilan.

Tertib: tumbuhnya rasa kesadaran diri dan disiplin dari setiap untuk melaksanakan setiap peraturan sehingga menciptakan regulasi birokrasi yang mudah murah dan cepat.

Asri: menciptakan suasana lingkungan dengan bersih, sehat dan indah. Dengan mengedepankan dan menumbuhkan kembangkan sikap kegotong royongan.

Peduli: tanggap atas setiap permasalahan dan cepat mengambil kebijakan untuk segera memecahkan masalah (Problem Solving) dengan sebaik baiknya.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Desa Laut Dendang yang merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan desa, maka misi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan, kecerdasan, intelektual, spiritual, dan emosional melalui peningkatan pelayanan pendidikan kesehatan yang merata dan berkualitas dengan memberdayakan partisipasi masyarakat.
- 2) Meningkatkan keberdayaan masyarakat sesuai potensi yang dimilikinya serta mengkembangkan kembali budaya hidup kegotong royongan sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat secara mandiri yang bermutu dan berkeadilan serta memberdayakan masyarakat dan keluarga di bidang perekonomian.
- 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hidup bersih dan sehat, pelayanan kesehatan masyarakat secara lebih optimal melalui pengembangan posyandu dan kesadaran kesehatan lingkungan tempat tinggal.
- 4) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan pengalaman ajaran agama, budaya, gotong royong, kerukunan antara warga masyarakat, mengurangi sengketa tanah serta penguatan sistem keamanan lingkungan melalui poskamling.

- 5) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah desa dan pelayanan masyarakat, melalui peningkatan kualitas pengurus lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.

B. Program Kerja Pemerintah Desa Laut Dendang Dalam Memberdayakan Masyarakat Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

1. Program Kerja Pemerintah Desa Laut Dendang Dalam Memberdayakan Masyarakat

Kemandirian masyarakat adalah wujud dari pengembangan kemampuan ekonomi daerah untuk menciptakan kesejahteraan dan memperbaiki material secara adil dan merata yang ujung nya berpangkal pada pemberdayaan masyarakat. Fungsi kepala desa dalam kaitannya dengan pemberdayaan yakni mengarahkan masyarakat pada kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran didalam kehidupan masyarakat.

Berbagai model pemberdayaan masyarakat dalam dinamika pengembangannya, tidak luput dari peran kepala desa dalam memberdayakan masyarakat. Banyak program pemberdayaan masyarakat yang di gulirkan pemerintah seperti:

- a. UP2K

Sebagai program berbasis keuangan masyarakat dengan sistem pengelolaan sederhana dan jumlah nilai uangnya relatif kecil. Saat ini kas UP2K Desa Laut

Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan sebesar Rp. 5.000.000. Dari modal awal Rp. 2.000.000.

b. Koperasi Wanita Siaga

Desa Laut Dendang juga telah memiliki koperasi wanita sejak tahun 2013, dan asstnya saat ini Rp. 13.000.000. Dari modal awal Rp. 5.000.000.

c. Program PPMK (Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) dari
PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat)

Program ini juga memberikan guliran dana yang di kelola seperti UP2K dan Koperasi Wanita Siaga. Asset PPMK saat ini sebesar Rp. 135.000.000. Dari modal awal 30.000.000.

d. BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa)

bidang usahanya simpan pinjam dengan modal awal Rp. 50.000.000.⁴

2. Kegiatan Program Kerja Desa Laut Dendang

a. Kegiatan Program Kerja I

- 1) Pembinaan PKBN
- 2) Penyuluhan Kadarkum
- 3) Penyuluhan PA2K
- 4) Gotong Royong

⁴ Sumber: Ekspos Pelaksanaan PNPM di desa Laut Dendang

- 5) Kegiatan Hari Besar Keagamaan
 - a) Tahun Baru Hijriah 1439 H
 - b) Maulid Nabi Muhammad SAW 1439 H
 - c) Isra' mi'raj Muhammad SAW 1438 H
- 6) Kegiatan Keagamaan
 - a) Perwiridan
 - b) Wirid Akbar Desa
 - c) Wirid Akbar Kecamatan
 - d) Santunan Kepada Anak Yatim (10 Muharram)
 - e) Tadarus Ramadhan
 - f) Pengajian/Tabligh Akbar
- b. Kegiatan Program Kerja II
 - a) Penyuluhan Tentang Traflicking
 - b) Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba
 - c) Pembinaan Paud
 - d) Pembinaan Koperasi
 - e) Pelatihan Jahit Menjahit
 - f) Pelatihan Salon/Tatarias Kecantikan
 - g) Pelatihan Processing/Membuat Kue
- c. Kegiatan Program Kerja III
 - a) Pembinaan Tatalaksana Rumah Tangga
 - b) Pembinaan Usaha Kerupuk Sanjai

- c) Pembinaan Usaha Ulos
- d) Pembinaan Usaha Mukena
- e) Pembinaan Usaha Tahu
- d. Kegiatan Program Kerja IV
 - a) Membina Kader Posyandu
 - b) Membina Kader Jumantik
 - c) Posyandu Lansia
 - d) Penyuluhan IVA
 - e) Penyuluhan HIV/AIDS
 - f) Pembinaan Desa Siaga

Dari sekian banyaknya program yang digulirkan, sebagian besar mengarah pada aspek kemandirian ekonomi. Hal ini sejalan dengan arah pemberdayaan masyarakat guna melepaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan. Kepala desa tentunya memiliki peran penting sebagai pemegang kebijakan, penggerak, dan fasilitator dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui PNPM. Berikut ini adalah peran kepala desa dalam memberdayakan masyarakat yaitu:

1. Pemberian Dana Dari Pemerintah Kepada Masyarakat

Dalam pemberian dana dari pemerintah kepada masyarakat Menurut Bapak Suwardi selaku kepala desa Laut Dendang sesungguhnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri ini sudah berjalan hampir 5 tahun ketika

Bapak Suwardi menjadi Kepala Desa beliau lah yang memotivasi masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat melalui program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.⁵

Bantuan langsung ekonomi merupakan uang secara langsung kepada masyarakat untuk memenuhi kehidupannya sehari hari. Bantuan langsung ekonomi bersifat konsumtif yang di peruntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu juga untuk usaha-usaha kecil yang membutuhkannya, meskipun merupakan bantuan langsung dari pemerintah maka harus di gunakan dengan sebaik-baiknya.

Menurut Ibu Fitri selaku PJ. Pengelola Keuangan PNPM calon penerima bantuan dana bergulir mempunyai syarat agar dapat mengikuti kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yaitu masyarakat yang ekonominya menengah kebawah, yang bertempat tinggal di Desa Laut Dendang, foto copy KK dan KTP, dan jaminan sekedar melengkapi berkas, serta yang menjadi sasaran dalam PNPM yaitu masyarakat desa Laut Dendang itu sendiri. Bantuan ekonomi langsung dari pemerintah Desa Laut Dendang di salurkan dalam bentuk:⁶

⁵ Suwardi, Kepala Desa Laut Dendang, jln Perhubungan, wawancara pribadi, 05 Mei 2018, pukul 12.30 Wib.

⁶ Erma Syafitri, Pengurus Pengelolaan Keuangan, jln Perhubungan, wawancara pribadi, 07 Mei 2018, pukul 11.34 wib

a. Dana

Dana yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Desa Laut Dendang sebanyak 159.000.000., juta-180.000.000., juta. Dana yang di gulirkan kepada masyarakat untuk peminjaman ada 2 macam di antara lainnya:

1. Reguler: 500.000.,-1.000.000., batas akhir pembayarannya per 10 bulan di potong pada awal pengambilan dana sebagai uang muka pembayaran.
2. Ppmk: 2.000.000.,-5.000.000., batas akhir pembayaran per 15 bulan sudah termasuk tabungan.

Perbedaan antara dana reguler dan ppmk yaitu jika peminjaman dana reguler maka batas akhir pengembalian dana per 10 bulan dan uang yang diberikan pemerintah untuk modal sebanyak 500.000-1.000.000 juta. Pada awal pengambilan uang di potong di awal sebagai tabungan utama, potongan untuk tabungan awal yaitu 100.000 sampai 150.000.

Jika dana ppmk maka batas akhir pengembalian dan per 15 bulan dan uang yang diberikan pemerintah untuk modal sebanyak 2.000.000-5.000.000 juta. Uang yang diberikan utuh tanpa di potong karena sudah termasuk pada tabungan.

Dalam program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri, masyarakat menggunakan dana nya dalam usaha kecil menengah. Dan dana tersebut diberikan agar dapat di jadikan modal dalam melakukan usaha-usaha kecil.

2. Kegiatan yang Dilakukan Oleh Pihak BKM PNPM Mandiri

Menurut Ibu Fitri selaku pengurus pengelola keuangan beliau mengatakan bahwa tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri itu sendiri adalah antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat Desa Laut Dendang dan untuk mengembangkan usaha mereka dari program tersebut.⁷

a. Pemberian Motivasi

Kegiatan ini memberatkan kepada materi-materi membangkitkan semangat bagi masyarakat kurang mampu agar pola pikir dan mental mereka berubah menjadi lebih baik, pendamping yang dilakukan dengan cara memberikan motivasi, masukan kreativitas kepada masyarakat kurang mampu agar mampu mengembangkan ekonomi dan usaha yang sedang dijani.⁸

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sudah berjalan hampir 5 tahun, akan tetapi Kegiatan ini dilakukan hanya sekali dan berlokasi di kantor desa, pesertanya masyarakat desa itu sendiri dan di ikuti oleh kepala dusun di masing-masing dusun dan kegiatan ini dilakukan pada awal masuknya program PNPM di desa Laut Dendang.

⁷ Erma Syafitri, Pengurus Pengelolaan Keuangan, jln Perhubungan, wawancara pribadi, 09 Mei 2018, pukul 10.34 wib

⁸ Sumber: proposal Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa Laut Dendang

Menurut bapak samsudin lubis selaku peserta PNPM kegiatan ini sangat membantu masyarakat agar mengetahui informasi mengenai PNPM dan beliau sangat mendukung dengan adanya PNPM beliau dapat mengembangkan usaha yang dimikinya serta mengembangkan ekonomi keluarganya. Tetapi sangat disayangkan sekali karena kegiatan ini hanya 1 kali dilakukan di Desa.

b. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat

No	Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat	Jumlah peserta	Jumlah hari	Jumlah event	Waktu pelaksanaan	Tempat
1	Pelatihan BKM, Lurah, Relawan	20	2	1	10-11 Juli 2017	Kantor Desa Laut Dendang
2	Pelatihan tim perencanaan partisipatif	15	2	1	12-13 Juli 2017	Kantor Desa Laut Dendang
3	On the job training	15	1	2	14 Juli 2017	Desa Laut Dendang
4	Pelatihan relawan	5	2	1	15-16 Juli 2017	Percut Sei Tuan
5	Pelatihan keterampilan	15	2	1	17-18 Juli 2017	Kantor Desa Laut Dendang
6	Pelatihan pengelolaan keuangan	2	2	1	15-16 Juli 2017	Percut Sei Tuan
7	Paket pengembangan media warga				Juli-oktober 2017	Desa Laut Dendang

Kegiatan ini bertujuan untuk dasar kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat dalam program PNPM, Membangun kolaborasi peningkatan ekonomi keluarga melalui pengembangan kapasitas bagi seluruh masyarakat serta membangun

kemandirian, pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan program PNPM.

Menurut bapak supati selaku peserta PNPM mengatakan bahwa kegiatan ini sangat bagus guna untuk pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan, operasional pendampingan masyarakat dan fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi.

C. Realisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

Bantuan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat agar kehidupannya membaik dari segi ekonomi. Dana bantuan tersebut di berikan kepada masyarakat dan bantuan untuk modal usaha masyarakat guna mengembangkan usaha dan ekonomi keluarga. Dampak dari adanya pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah desa sangat positif dan merasa terbantu dengan adanya program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri.

Menurut bapak Suwardi dan ibu Fitri bahwa program yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat kurang mampu memiliki dampak yang menjanjikan dalam menuntaskan kemiskinan dan membuat masyarakat lebih mandiri dalam mengembangkan usaha dan perekonomian keluarga. Dan ini pun sudah di buktikan oleh masyarakat Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Tabel 5. Masyarakat yang mengikuti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Desa Laut Dendang.

No	Nama	Nama Usaha	Modal Awal	Peminjaman	Pengembalian/Bln
1	Nur Ainun	Kedai Lontong	125.000.000	4.000.000	1.000.000
2	Nur Lia	Gorengan	4.600.000	4.000.000	1.000.000
3	Boinah	Jamu	4.500.000	4.000.000	1.000.000
4	Riyanto	Ayam Potong	4.500.000	4.000.000	1.000.000
5	Fitri	Kedai Lontong	2.700.000	4.000.000	1.000.000
6	Sugiono	Bengkel	5.000.000	5.000.000	1.500.000
7	Elmiyani	Door Smear	5.000.000	4.000.000	1.250.000
8	Mardiyah	Menjahit	7.000.000	4.000.000	1.000.000
9	Susanto	Kedai Kelapa	5.000.000	5.000.000	1.500.000
10	Sukartini	Ternak Bebek	1.800.000	5.000.000	1.000.000
11	Supatik	Ayam Penyet	73.000.000	5000.000	1.500.000
12	Sutarseh	Kedai Sembako	70.000.000	5.000.000	1.500.000
13	Nuraini	Kedai Lontong	24.500.000	4.000.000	1.000.000
14	M. Syahrul	Menjahit	28.500.000	5.000.000	1.500.000
15	Markilah	Kedai Lontong	35.000.000	5.000.000	1.500.000
16	Dewi	Kedai Lontong	34.600.000	5.000.000	1.500.000
17	Syamsiah	Menjahit	51.200.000	5.000.000	1.500.000
18	Rosnani	Toko Baju	43.200.000	5.000.000	1.500.000
19	Suriyani	Nasi Goreng	32.300.000	5.000.000	1.500.000
20	Jumaiyah	Jual Makanan	32.700.000	5.000.000	1.500.000
21	Hariadi	Kedai Lontong	73.000.000	4.000.000	1.000.000
22	M. Dhani	Kedai Lontong	36.500.000	4.000.000	1.000.000
23	Partinawati	Warung Jajan	21.000.000	4.000.000	1.000.000
24	Ngadisah	Mie Sop	31.250.000	5.000.000	1.500.000
25	Titin	Kedai Makanan	19.200.000	5.000.000	1.500.000
26	Samsudin	Mie Sop Iga	21.250.000	5.000.000	1.500.000

Nama diatas yaitu masyarakat yang mengikuti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang ada di desa Laut Dendang yang masing-masing masyarakatnya merasa terbarbantu dengan adanya program tersebut.

Kehidupan masyarakat Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang semakin baik dari segi ekonomi dan sumber daya manusia mereka juga meningkat karena adanya program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri, mereka mengaku bahwa kegiatan ini sangat mendukung dan terbantu karena mereka bisa mandiri dalam mengembangkan usaha dan perekonomian keluarga.⁹

D. Hambatan Dan Dukungan Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

1. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dan pendukung dalam kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri yaitu:

a. Terbatasnya dana dari pemerintah

Menurut Bapak Suwardi selaku kepala desa dan ibu Fitri selaku pengelola keuangan mengatakan bahwa terbatasnya bantuan pemerintah sehingga banyak masyarakat yang berminat ikut sebagai peserta dan penerima bantuan namun harus menunggu giliran berikutnya. Terkait dengan kesiapan anggaran dana untuk setiap pelaksanaan kegiatan maka menurut bapak Suwardi bahwa setiap pelaksanaan kegiatan harus didukung dengan segala penyiapan sumber daya guna menggerakkan kegiatan

⁹ Sumber: Laporan Format Perencanaan/Proposal Usaha Peserta PNPM Desa Laut Dendang

pelaksanaan termasuk di dalamnya sarana, prasarana, sumber daya keuangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

b. Pengembalian peminjaman

Menurut ibu Fitri mengatakan bahwa pengembalian peminjaman yang kurang lancar karena sebagian masyarakat merasa dana hiba bahkan ada yang lari karena tidak mau membayar dan sebagian masyarakat juga sadar dan membayar agar dana tersebut dapat digulirkan kembali kepada masyarakat yang belum mendapatkannya.¹⁰

2. Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung dalam kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri adalah:

a. Tingginya minat peserta

Tingginya minat peserta membuat pemerintah desa harus menambah dana bantuan, karena masih banyak yang ingin mengikuti kegiatan pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri dengan alasan ingin mengembangkan usaha dan ekonomi mereka.

¹⁰ Erma Syafitri, Pengurus Pengelolaan Keuangan, jln Perhubungan, wawancara pribadi, 07 Mei 2018, pukul 11.34 wib

b. Masyarakat yang sangat mendukung

Dengan adanya pelaksanaan kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri masyarakat sangat mendukung, dengan alasan dapat mengembangkan usaha dan ekonomi keluarga. Sesungguhnya banyak sekali masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri yang di laksanakan oleh pemerintah desa tetapi karena dana yang sangat terbatas dan pengembalian dana yang kurang lancar sehingga sulit untuk menambah menambah peserta pemberdayaan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan wawancara dan observasi dengan beberapa informan, staf desa dan kepala desa Laut Dendang bahwa program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri yang dilakukan selama ini cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan partisipasi masyarakat yang ikut dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Program yang di lakukan pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat melalui program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri, dengan mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah desa melakukan berbagai rangkaian program dan kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat dengan program kerja: UP2K, koperasi wanita siaga, PPMK, dan BUMDesa. Kegiatan seperti: pembinaan PKBN, penyuluhan kadarkum, penyuluhan PA2K, gotong royong, kegiatan hari besar keagamaan, dan kegiatan lainnya telah dan sedang di lakukan di desa Laut Dendang.

Program yang dilakukan pemerintah Desa Laut Dendang dalam melaksanakan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri adalah upaya pemberdayaan dalam mengembangkan potensi sehingga dapat meningkatkan usaha dan ekonomi masyarakat yang di harapkan dari hasil program ini bisa memberikan

modal kepada masyarakat guna untuk mengembangkan usaha sehingga dapat mandiri dan memperbaiki atau memaksimalkan ekonomi serta sumber daya manusia.

Realisasi program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri dipengaruhi secara langsung oleh tingkat partisipasi masyarakat di dalam ruang lingkup desa. Jika partisipasi masyarakat desa tinggi maka tingkat keberhasilan program tersebut akan tinggi begitu pula sebaliknya. Dalam kenyataannya tingkat partisipasi masyarakat desa Laut Dendang guna menyukseskan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri sangat tinggi, oleh karena itu program yang di laksanakan pemerintah desa Laut Dendang dapat berjalan sesuai rencana.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai upaya pemerintah dan masyarakat melalui program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri. Adapun saran-saran dari penulis diantaranya:

1. Program pemerintah desa harus lebih melebarkan sayapnya ke pemerintahan kecamatan agar masyarakat yang sama-sama membutuhkan dana bergulir dapat merasakannya dalam mengembangkan ekonomi masyarakat.
2. Hendaknya program pemerintahan desa mengulurkan proposal kepada pemerintahan kecamatan agar dana bergulir dapat bertambah supaya masyarakat desa yang kurang mampu lainnya dapat merasakannya.

3. Hendaknya pemerintah desa mengawasi program agar program dapat berjalan dengan baik.
4. Mengajak masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam kegiatan dan kesiapan masyarakat untuk menyalurkan aspirasi. Keinginan dan kebutuhan masyarakat berkaitan dengan pemberdayaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi program agar program dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana.
5. Untuk penyelenggaraan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri selanjutnya perlu perhatian yang lebih dari pemerintah di mana proses pengaliran dananya tersalurkan dengan benar.
6. Program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri ini harus lebih disosialisasikan karena sesungguhnya program ini menarik.

DAFTAR WAWANCARA

A. Pertanyaan Umum Diajukan Kepada Kepala Desa

1. Apa yang melatar belakangi terbentuknya pemerintahan desa Laut Dendang?
2. Apa yang menjadi dasar Kepala Desa dalam melaksanakan pemerintahan desaLautDendang?
3. Apa visi & misi dari pemerintahan desaLautDendang?
4. Apa yang menjadi tujuan dari pelaksanaan visi & misi dari pemerintah desaLautDendang?
5. Apa strategi Kepala Desa dalam mewujudkan visi & misi tersebut?
6. Programapajaya yang ditawarkan di desa Laut Dendang?
7. Kapan berdirinya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di desa Laut Dendang?
8. Apa peran kepala desa dalam melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di desa Laut Dendang?
9. Upaya apa saja yang dilakukan kepala desa dalam memberdayakan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di desa Laut Dendang?
10. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung kepala desa dalam memberdayakan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di desa Laut Dendang?

11. Keberhasilan apa saja yang telah dicapai kepala desa dalam memberdayakan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di desa Laut Dendang?

12. Bagaimana prestasi ekonomi masyarakat sesudah mendapatkan bantuan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di desa Laut Dendang?

B. Diajukan Kepada pengurus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

1. Apa tujuan dari diadakannya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di desa Laut Dendang?

2. Sudah sejauh mana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di desa Laut Dendang dilaksanakan?

3. Kendala apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di desa Laut Dendang?

4. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di desa Laut Dendang?

5. Kegiatan apa saja yang terdapat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di desa laut Dendang?

6. Siapa saja yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Desa Laut Dendang?

7. Apakah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di desa Laut Dendang sudah di rasakan oleh masyarakat yang sesuai dengan indikator-indikator tersebut?

8. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di desa Laut Dendang?
9. Pihak mana saja yang ikut terlibat dalam pelaksanaan dan penyampaian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di desa Laut Dendang?
10. Bagaimana partisipasi yang dilakukan warga masyarakat terhadap pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di desa Laut Dendang?

C. Diajukan Kepada Masyarakat yang Mengikuti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di desa Laut Dendang?
2. Menurut bapak/ibu sejauhmana pencapaian terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di desa Laut Dendang?
3. Apakah bapak/ibu merasa terbantu dengan adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di desa Laut Dendang?
4. Bagaimana partisipasi bapak/ibu terhadap pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Desa ini?
5. Menurut bapak/ibu apa saran yang harus diperbaiki dalam kerja Program Nasional Masyarakat Mandiri di desa ini?

DAFTAR PUSTAKA

- Cipta Karya, Dirjen. Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan, (Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum,2009). <http://www.id>. Pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri pedesaan di akses pada tanggal 18 januari 2018 pukul 12.03 wib.
- Depertemen Agama, Al-Qur'anulkarim dan terjemahannya: (bogor:2007).
- Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat,(Bandung:Refika Aditama, 2005).
- Erma Syafitri, Pengurus Pengelolaan Keuangan, jln Perhubungan, wawancara pribadi, 07 Mei 2018, pukul 11.34 wib
- Hadiyanti, Puji, 2006. Kemiskinan dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat: JurnalPengembangan Islam Volume 2, No 1, (online), komunitas. diakses pada tanggal 1 Desember 2017 pukul 15.25.
- H.M Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (jakarta:PT. Raja Grapindo Prsada, 2007).
- Hutomo, M.Y, Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi, (Artikel Nmajalah Perencanaan Bappenas Naskha 2000 No. 200), (online), diakses 26 oktober 2017.
- Jauhari, Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial, (Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia 2005).
- Lainatus Sifah, Islam & Pembangunan, (Bandung: Cita pustaka Media,2008).
- Matthoriq, dkk, *Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Masyarakat Bajulmati, Gajah rejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang)*, Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol. 2, No. 3.
- Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safi'i, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: Gerbang Masyarak Baru, 2005).
- PNPM 2012, PNPM Mandiri Masyarakat Pedesaan, website Resmi PNPM. Diakses pada tanggal 11 januari 2018 pukul 13.15 wib.
- Sigit Suwardianto, "Peranan Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Desa Sidoangung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman", jurnal

pemberdayaan masyarakat volume 1 , (online), di akses pada tanggal 1 februari 2018 pukul 15.36.

Soetomo, Pengembangan Masyarakat, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009).

Suwardi, Kepala Desa Laut Dendang, jln Perhubungan, wawancara pribadi, 05 Mei 2018, pukul 12.30 Wib.

Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, Pemberdayaan Masyarakat, (Bandung: Alfabeta, 2017).

Usman, Sunyoto. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat: (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2006).

<http://www.visioner.id/opini/9933/program-pemberdayaan-masyarakat-desa-2.html>
diakses pada tanggal 17 januari 2018 pukul 15.25 wib.

http://id.wikipedia.org/wiki/PNPM_Mandiri_Pedesaan. Diakses pada tanggal 17 januari 2018 pukul 15.43 wib.

<http://kbbi. Web. Id/Peran. Com>. Diakses pada tanggal 10 januari 2018 pukul 11.00 wib.

<http://kbbi. Web. Id/Kepala Desa. Com>. Diakses pada tanggal 10 januari 2018 pukul 11. 15 wib.

<http://kbbi. Web. Id/Pemberdayaan Masyarakat. Com>. Diakses pada tanggal 10 januari 2018 pukul 11.22 wib.

Skripsi Erma Sari, Peran Kelompok Tani Tunas Muda Muslim Dalam Meningkatkan Hasil Panen Padi Dusun XIV Pasar Melintang Tandam Hilir II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang.

Skripsi Ratih Kumala Dewi, peran pemerintah desa dalam memberdayakan perempuan muslimah melalui program usaha mikro di desa selat besar kecamatan bilal hilir kabupaten labuhan Batu.

Sumber: data desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan.

Sumber:Laporan format perencanaan/proposal usaha peserta PNPM desa Laut Dendang.

Sumber: proposal Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa Laut Dendang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas

Nama : Siti Kholijah
Nim : 13.14.4.014
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi
Pengembangan Masyarakat Islam
Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Dodek/17 Maret 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Orang Tua
Ayah : Alm. Junaidi
Ibu : Jamilah
Alamat : Jln Jend. Ahmad Yani
Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara

B. Latar Belakang Pendidikan

SD Negeri 3 010234 Pangkalan Dodek Tahun 2008
SMP Ponpes Modren Al-Hasymiyah Tebing Tinggi Tahun 2011
SMA Swasta Bandar Khalifa Serdang Bedagai Tahun 2014
Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan 2014-Hingga sekarang

C. Pengalaman Organisasi

1. Sebagai Departemen Keagamaan dan Dakwah HMJ Pengembangan Masyarakat Islam
2. Sebagai Anggota Muda HMI
3. Sebagai Dirjen Tim Paduan Suara Fakultas Dakwah dan Komunikasi
4. Sebagai anggota AFG
5. Sebagai Anggota IPMBB